

ABSTRAK

Permasalahan sengketa tanah bersertipikat ganda menjadi fenomena yang kompleks dan sering terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Purwakarta. Sertipikat ganda merupakan kondisi di mana satu bidang tanah dimiliki oleh lebih dari satu pihak berdasarkan dokumen sertipikat resmi yang berbeda. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga memicu konflik horizontal di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor penyebab terjadinya penerbitan sertipikat ganda di Kabupaten Purwakarta serta mengevaluasi efektivitas penyelesaian sengketa tersebut melalui mediasi di Kantor Pertanahan setempat.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penerbitan sertipikat ganda atas tanah di Kabupaten Purwakarta, dan untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian sengketa tanah bersertipikat ganda melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dan untuk hambatan dan solusi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa hak atas tanah bersertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta.

Metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer, yang diperoleh langsung melalui penelitian lapangan, serta data sekunder berfungsi untuk melengkapi data primer. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif.

Faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kabupaten Purwakartayaitu Kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu, Kesalahan Teknis dalam Pengukuran dan Pemetaan, dan Kurangnya Edukasi kepada Masyarakat. Proses penyelesaian sersertipikat ganda di Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta berawal dari pengaduan masyarakat, Lalu pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta mengkaji dan meneliti masalah terkait, Selanjutnya tim Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta menyusun laporan hasil penelitian untuk menjadi rekomendasi penyelesaian masalah. Lalu Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta memanggil para pihak untuk melakukan mediasi untuk mencari Solusi terbaik. Hambatan utama Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta dalam mediasi sengketa tanah bersertipikat ganda adalah ketidakhadiran atau itikad tidak baik dari para pihak, Solusi yang diperlukan untuk meminimalisir terjadinya sengketa tanah bersertipikat ganda yaitu Penegasan Kewajiban dan Sanksi Administratif, Digitalisasi Data Pertanahan, Penertiban dan Pembaruan Data, Peningkatan Kompetensi dan Integritas Petugas pertanahan, Pengawasn dan Penegakan Hukum.

Kesimpulan dari penulis ialah faktor utama penyebab terjadinya sertipikat ganda di Kabupaten Purwakarta meliputi kurang tertibnya administrasi pertanahan di masa lalu, kesalahan teknis dalam pengukuran dan pemetaan, serta kurangnya edukasi kepada Masyarakat. Untuk mencegah sertipikat ganda yaitu penegasan kewajiban dan sanksi administratif, digitalisasi dan integrasi data pertanahan, penertiban dan pembaruan data, peningkatan kompetensi petugas, serta pengawasan dan penegakan hukum yang ketat. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa dan mencegah terjadinya sertifikat ganda di masa depan.

Kata Kunci: Sengketa tanah, sertipikat ganda, mediasi, Kantor Pertanahan, kepastian hukum, Kabupaten Purwakarta.

ABSTRACT

The issue of land disputes involving double certificates is a complex phenomenon that frequently occurs in Indonesia, including in Purwakarta Regency. Double certification refers to a condition in which one parcel of land is claimed by more than one party based on different official land certificates. This situation not only creates legal uncertainty but also triggers horizontal conflicts within the community. This study aims to identify the factors that cause the issuance of double land certificates in Purwakarta Regency and to evaluate the effectiveness of dispute resolution through mediation at the local Land Office.

The objectives of this study are to examine and analyze the factors contributing to the issuance of double land certificates in Purwakarta Regency, to investigate the mediation process for resolving such disputes at the Purwakarta Land Office, and to explore the obstacles and solutions in the implementation of the dispute resolution process. The research employs an empirical juridical approach with descriptive-analytical specifications. The data collected consists of primary data obtained directly from field research, and secondary data that supports and complements the primary data. Data analysis is conducted qualitatively through inductive reasoning.

The factors causing double certification in Purwakarta Regency include the lack of orderly land administration in the past, technical errors in land measurement and mapping, and the lack of public education regarding land rights. The dispute resolution process begins with a public complaint, followed by investigation and analysis by the Land Office. A report is then prepared containing recommendations for resolution. The disputing parties are summoned for mediation, where the Land Office acts as a neutral facilitator to help reach an amicable solution. The main obstacle faced is the absence or bad faith of the disputing parties. Proposed solutions to minimize future double certification cases include the enforcement of obligations and administrative sanctions, digitization and integration of land data, verification and updating of land records, enhancement of staff competence and integrity, as well as strengthened supervision and legal enforcement.

The conclusion of this study is that the primary causes of double certification in Purwakarta Regency are disorganized past land administration, technical measurement errors, and lack of community awareness. Preventive measures include enforcing obligations and sanctions, digitizing and integrating land data, verifying old certificates, improving staff competence, and ensuring strong legal oversight. Through these efforts, it is expected that dispute resolution will become more effective and instances of double certification can be prevented in the future.

Keywords: *Land dispute, double certificate, mediation, Land Office, legal certainty, Purwakarta Regency.*